

# AL-MAIYYAH

## Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan

ISSN 1979-245X (print)  
ISSN 2548-9887 (online)

VOLUME 12 NO. 2 DESEMBER. 2019

### Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan

**Nursaptini<sup>1</sup>, Muhammad Sobri<sup>2</sup>, Deni Sutisna<sup>3</sup>, Muhammad Syazali<sup>4</sup>, Arif Widodo<sup>5</sup>**

Universitas Mataram

nursaptini@unram.ac.id, muhammad.sobri@unram.ac.id, denisutisna@unram.ac.id,  
m.syazali@unram.ac.id, arifwidodo@unram.ac.id

**Abstract:** This paper aims to describe the patriarchal culture and women's access to education. The method used in this research is literature study from various sources such as books, journals, reports and data from the Central Statistics Agency. The results of this study are that patriarchal culture is inherent in a society that considers that the primary education should be boys. This causes women's access to education to be hampered due to cultural problems that exist in the community. This situation can be seen based on data on the percentage of literacy for women totaling 83.42 while men 91.86. This data is also supported by the data of the Human Development Index for men reaching 75.43 while the Human Development Index for women is 68.63. This data shows the level of education of women, especially in higher education is low. This reality certainly contradicts the goal of national education which does not differentiate access to education based on gender, all of whom are entitled to education.

**Keywords:** Patriarchal Culture, Women's Access, Education

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber seperti dari buku, jurnal, laporan dan data dari Badan Pusat Statistik. Hasil kajian ini adalah budaya patriarki sudah melekat dalam masyarakat yang menganggap bahwa yang harus mendapatkan pendidikan yang utama adalah anak laki-laki. Hal ini menyebabkan akses perempuan untuk mengenyam pendidikan terhambat karena masalah kultur yang ada dalam masyarakat. Keadaan ini dapat dilihat berdasarkan data persentase melek huruf untuk perempuan berjumlah 83,42 sedangkan laki-laki 91,86. Data ini juga didukung data Index Pembangunan Manusia laki-laki mencapai 75,43 sementara Index Pembangunan Manusia perempuan sebesar 68,63. Data ini menunjukkan tingkat pendidikan perempuan terutama pada pendidikan tinggi rendah. Realitas ini tentunya bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang tidak membedakan akses pendidikan berdasarkan jenis kelamin semuanya berhak mendapatkan pendidikan.

**Kata Kunci:** Budaya Patriarki, Akses Perempuan, Pendidikan

### PENDAHULUAN

Akses pendidikan merupakan hak seluruh rakyat sebagaimana yang tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa pendidikan nasional ditujukan untuk semua warga negara. Dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut pemerintah telah melaksanakan wajib belajar 6 tahun, kemudian meningkat program belajar 9

tahun, dan sekarang mulai mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Agar program tersebut tercapai negara memberikan penjaminan-penjaminan kepada rakyatnya yang kurang mampu agar bisa megakses pendidikan. Saat ini terdapat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di peruntukkan bagi pendidikan dasar sebagai subsidi dalam pembiayaan pendidikan.

Walaupun dalam segi pembiayaan terutama pendidikan dasar sudah difasilitasi oleh negara masih banyak warga negara yang belum dapat mengakses pendidikan. Keadaan ini dapat dilihat berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2018 bahwa capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 75,43 sementara IPM perempuan sebesar 68,63 (Badan Pusat Statistik, 2018). Secara konseptual, realitas ini menunjukkan adanya disparitas gender.

Ketidaksetaraan akses perempuan dalam pendidikan salah satunya disebabkan oleh budaya patriarki yang sebagian besar ada di belahan dunia termasuk Indonesia (Nasir & Lilianti, 2017). Masyarakat yang menganut patriarki menempatkan peran laki-laki lebih dominan dalam segala hal dibandingkan perempuan (Rokhmansyah, 2016)

Budaya paternalistik dan ideologi patriarki yang dianut masyarakat membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Hal ini turut menyumbang pada rendahnya kualitas perempuan. Termasuk pada masyarakat sasak di NTB, yang sistem kekerabatannya menganut sistem patrilineal. Sistem kekerabatan Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki (Moechtar, 2019). Di mana sistem ini mendorong melekatnya budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat membuat kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat rendah terutama bagi anak perempuan, yang menjadi prioritas dalam mengakses pendidikan ialah anak laki-laki. Hal ini terlihat dari data rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin di provinsi NTB tahun 2018 yaitu laki-laki 8,21 dan perempuan 7,13 (Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2018).

Pengkonstruksian budaya patriarki dimulai dalam lingkungan keluarga. Budaya patriarki dalam masyarakat seakan-akan terjadi begitu saja. Hal inilah yang membuat anggapan terhadap kaum perempuan secara kodrat lebih lemah (Adji,

2009). Selain itu, keluarga yang menganut sistem patriarki memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki daripada anak perempuan (Wardani, 2009).

Kurangnya akses pendidikan anak perempuan yang terjadi khususnya di masyarakat sasak NTB. Disebabkan oleh budaya patriarki yang dimana dalam akses pendidikan anak laki-laki diutamakan seperti terlihat dalam data Badan Pusat Statistik NTB bahwa angka melek huruf laki-laki 91,86 dan perempuan 83,42. Kenyataan bahwa angka melek huruf penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka melek huruf penduduk perempuan di seluruh kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang buta huruf. Berdasarkan gambaran realitas masalah tersebut perlu dikaji tentang bagaimana budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berasal dari buku dan jurnal serta data sekunder. Melalui data ini mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari berbagai sumber.

## **PEMBAHASAN**

Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah yang utama, dan melakukan kendali terhadap wanita. Menurut Pyke (1996) Ada tiga asumsi penting mendasari ideologi patriarki yaitu: 1) Kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok yang dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang. 2) Ideologi hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari, cenderung diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai sesuatu yang memang demikianlah semestinya. 3) Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerja sama sosial sebab jika tidak demikian, yang terjadi justru suatu konflik (Muhammad, 2001)

Tipe ideal patriarki dalam teori Weber mengasumsikan bahwa dominasi atas perempuan adalah fenomena “alamiah”. Para anggota keluarga menerima dominasi sebagai kebenaran yang seharusnya. Mereka tidak mempermasalahkan tradisi dan keyakinan yang mendukung praktik patriarki, serta menerima kehidupan subordinatnya (Munfarida, 2009)

Pada masyarakat terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya akan ke dapur. Bahkan dalam keluarga yang memiliki keuangan terbatas, maka pendidikan akan diprioritaskan pada anak laki-laki (Narwoko, J. Dwi & Suyanto, 2013). Biasanya orang tua lebih mementingkan anak laki-lakinya untuk sekolah yang tinggi sedangkan anak perempuannya diminta di rumah. Hal ini membuat anak perempuan kesulitan untuk mendapatkan akses pengetahuan.

Pada dasarnya ada faktor kultural yang menyebabkan individu dalam keluarga dan masyarakat tidak mempunyai akses yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Salah satu hambatan kultural tersebut adalah adanya relasi gender (*gender relation*) yang tidak adil dan setara sebagai akibat dari budaya yang sangat paternalistik, di masyarakat kondisi seperti ini nampak dengan jelas karena sampai saat ini keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan lain-lain masih cukup menonjol (Arjani, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian Yudhaningrum (Yudhaningrum, 2009) bahwa masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya patriarki sangat berpengaruh pada pola pendidikan di keluarga yang diterapkan pada anak. Orang tua dalam mendidik anak disesuaikan dengan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat dimana mereka tinggal. Anak laki-laki cenderung dididik untuk menjadi calon kepala rumah tangga dan anak perempuan dididik untuk menjadi calon pendamping suami yang baik (ibu rumah tangga). Perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan terjadi dalam penanaman moral terutama mengenai cara duduk dan pergaulan anak, penanaman nilai sosial, cinta kasih, dan dukungan terhadap pendidikan formal.

Pemerataan pendidikan memiliki arti pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan memiliki dua aspek, yaitu aspek persamaan kesempatan

(*equality*) dan aspek keadilan (*equity*). Persamaan artinya kesempatan untuk memperoleh pendidikan meninjau apakah akses terhadap pendidikan telah merata. Aspek keadilan dalam memperoleh pendidikan meninjau apakah kesempatan memperoleh pendidikan telah sama antar berbagai kelompok (Pendidikan, 2007).

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat demokrasi. Sistem pendidikan demokratis memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas (Tilaar, 2009). Mengenyam pendidikan wajib bagi setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, pendidikan tidak mengenal jenis gender, gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural (Zaki, 2018).

Pemerataan akses pendidikan dasar sembilan tahun sebagai sebuah investasi pada pengembangan sumber daya manusia (Ali, 2009). Berbagai peraturan yang ada berkaitan dengan pentingnya pendidikan sampai hal-hal teknis sudah dijelaskan dalam Undang-undang (Hakim, 2016). Diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Setiap warga negara Indonesia berhak mengenyam atau mengakses pendidikan sampai pendidikan tinggi. Hal ini direalisasikan dengan memberikan penjaminan-penjaminan seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan bantuan-bantuan lain untuk pendidikan tinggi. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat walaupun sudah ada kebijakan yang mengatur untuk kesamaan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Akan tetapi karena pengaruh kultur sebagian warga negara terpinggirkan untuk mengakses pendidikan.

Hasil penelitian (Atta, 2015) menjelaskan bahwa apabila masyarakat mengubah sikap negatif terhadap akses anak perempuan dalam bidang pendidikan maka akan memicu revolusi dalam pendidikan anak perempuan. Keadaan ini akan memunculkan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, tidak ada alasan mendiskriminasikan pendidikan untuk perempuan. Sehubungan dengan itu maka budaya-budaya dan segala hal yang menghambat kesempatan kaum perempuan

untuk mendapatkan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya harus diperhatikan (Nasir & Lilianti, 2017).

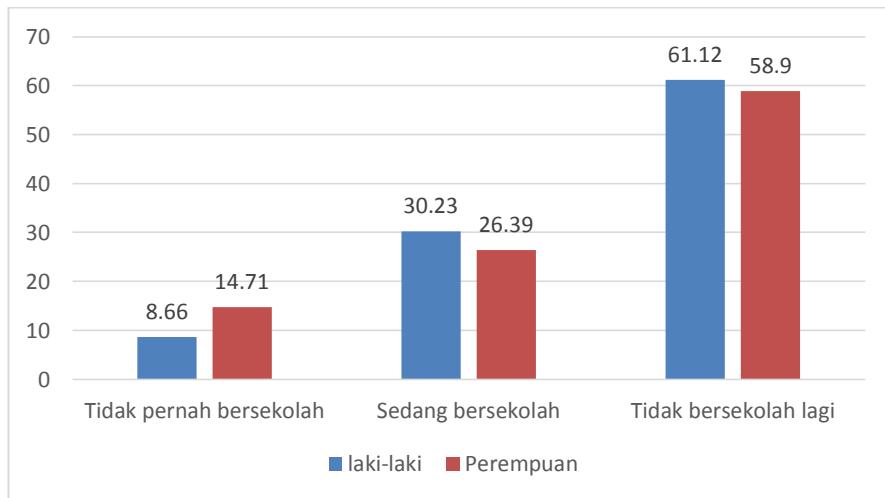
Negara menjamin adanya persamaan akses pendidikan bagi setiap warga negara. Termasuk kaum perempuan memiliki akses (Mukhtar, 2019) yang setara dengan laki-laki dalam perannya di dalam masyarakat. Namun karena adanya efek diskriminasi gender, yaitu perbedaan kesempatan atau perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Efek diskriminasi gender ini salah satunya adalah perbedaan kesempatan secara konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan (Rizkiyana & Widodo, 2011).

Efek diskriminasi gender tidak lepas dari masih langgengnya budaya patriarki yang berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia (Sakina, 2017). Pada kesempatan ini akan mendeskripsikan gambaran tentang efek diskriminasi gender salah satunya yang terjadi pada masyarakat sasak di NTB.

Suku sasak adalah penduduk asli dan merupakan kelompok etnik mayoritas di Lombok. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat sasak ialah sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem patrilineal, seseorang akan menelusuri ikatan kerabatnya yang primer melalui ayahnya, ayah dari ayahnya ayah, dan seterusnya. Dengan demikian, orang tersebut tergolong dalam kelompok keturunan yang terdiri atas ayahnya, saudara-saudara pria ayahnya, saudara-saudara prianya sendiri, dan putra-putranya sendiri. Adapun ibunya dapat ataupun tidak, merupakan anggota kelompok patrilinealnya. Keluarga primer ibunya (misalnya, ayah dari ibu saudara dan saudara wanita ibunya) tidak merupakan anggota kelompok (Suntana, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian (Rizkiyana & Widodo, 2011) bahwa budaya paternalistik dan ideologi patriarki yang dianut masyarakat membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Hal ini turut menyumbang pada rendahnya kualitas perempuan. Keadaan ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 yang dijelaskan pada gambar 1.

Gambar 1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi NTB, 2018.



Sumber: (Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2018)

Berdasarkan data di atas menunjukkan persentase penduduk perempuan yang tidak pernah bersekolah lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki, hal ini tentunya sejalan dengan data penduduk yang sedang bersekolah bahwa penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kemudian terkait dengan data terakhir tentang penduduk tidak bersekolah lagi menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat masih ada yang diprioritaskan. Jika dalam suatu keluarga masih ada anak laki-laki maka ialah yang akan mendapatkan prioritas untuk mengenyam pendidikan (Nasir & Lilianti, 2017).

Perbandingan akses pendidikan juga dapat di lihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan. Keadaan ini juga membuat tingkat buta huruf/buta aksara bagi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki salah satu contohnya yang terjadi di Lombok Tengah sebagaimana yang dijelaskan dalam gambar. 2.

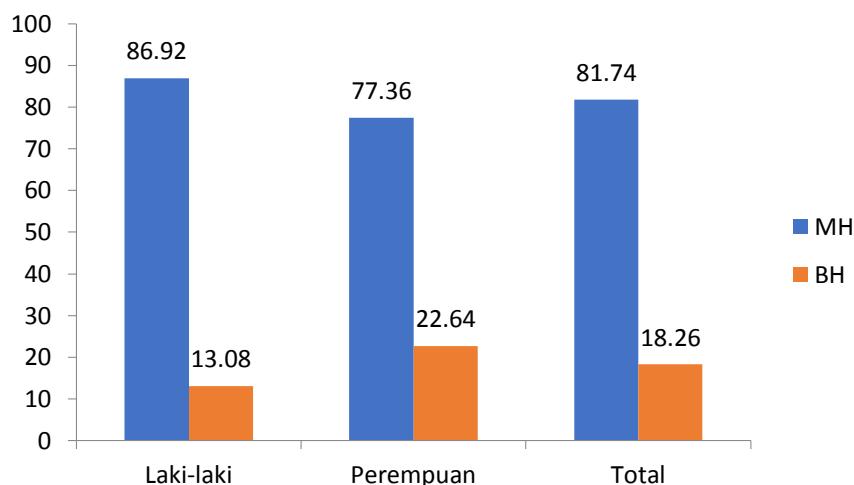
Tabel 1. Rata-rata lama sekolah (Tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin Provinsi NTB, 2018.

Laki-laki	8,21
Perempuan	7,13
Laki-laki+Perempuan	7,64

Berdasarkan data persentase tingkat buta huruf dan melek huruf yang ditunjukkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang buta

huruf. Hal ini menyebabkan sulit berkembang karena dari sisi *culture* masih ada hal-hal yang membatasi, misalnya untuk bersekolah, masih ada anggapan perempuan tidak usah bersekolah yang tinggi (Handayani & Widodo, 2014).

Gambar 2. Persentase tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah 2013

Ketidaksetaraan gender terhadap pendidikan anak perempuan di masyarakat sasak disebabkan oleh masih kentalnya budaya patriarki. Perbedaan ini memunculkan atau melahirkan ketidakadilan (*gender inequalities*) terutama bagi perempuan. Padahal dalam deklarasi hak asasi manusia pasal 26 dinyatakan bahwa: "setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan Cuma-Cuma, setidaknya untuk sekolah tingkat dasar dan menengah" (Fatimah, 2014) Hasil penelitian Jeanny Maria Fatimah mengungkapkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada akses pendidikan anak laki-laki diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan.

Perempuan yang dapat mengenyam pendidikan tinggi menguntungkan bagi keluarga. Akan tetapi banyak masyarakat yang masih awam tentang itu. Sebagaimana hasil penelitian Novrian Satria Perdana bahwa seorang anak dengan latar belakang pendidikan ibu mencapai jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi apabila dibandingkan anak dengan latar belakang pendidikan Ibu hingga jenjang pendidikan dasar (Perdana, 2015). Tingkat pendidikan yang tinggi dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berpengaruh pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya.

Pendidikan yang diawali dari rumah menjadi awal bagi seorang anak untuk menjadi berpotensi. Untuk itulah, seorang ibu idealnya memiliki pendidikan yang memadai demi berkembangnya kemampuan dan keterampilan seorang anak. Hal ini membuat pendidikan bagi perempuan sangat penting untuk menopang kualitas sumber daya perempuan (Natasha, 2013). Tingkat partisipasi perempuan yang baik di bidang pendidikan berakibat pada partisipasi perempuan dalam bidang perekonomian yang membaik pula (Prantiasih, 2014).

Penjelasan uraian di atas menunjukkan kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Melainkan upaya membangun relasi dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan (Efendy, 2014). Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seharusnya mereka memiliki akses yang sama dalam hal memperoleh pekerjaan, pendidikan, mengambil keputusan, bergabung dalam politik dan lain sebagainya. Akan tetapi, terjadi ketimpangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan (Sakina, 2017).

## KESIMPULAN

Akses pendidikan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin dalam undang-undang. Walaupun begitu masih terdapat warga negara yang terdiskriminasi dalam mendapatkan haknya. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang angka melek huruf dan buta huruf angka rata-rata lama sekolah. Data-data itu menunjukkan masih terhambatnya penduduk perempuan dalam mengakses pendidikan. Keadaan ini tidak lepas dari masih langgengnya budaya patriarki dalam masyarakat yang memprioritaskan anak laki-laki dalam akses di segala bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M. et all. (2009). *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*. Sumedang: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing*. Bandung: Imperial Bhakti Utama.
- Arjani, N. L. (2007). Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki. *Jurnal Studi Gender Srikandi*, 6(1), 1-10.

- Atta, G. P. (2015). Education Inequality: How Patriarchy and Policy Collide in Ghana. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(71), 11–19. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/0f4a/4b2f93507330ba034c5fb0bd1adaf8ee9fda.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1557/pada-tahun-2018--indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-mencapai-71-39.html>
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. (2018). *Statistik Gender Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Retrieved from <https://ntb.bps.go.id/publication/2019/08/30/04eef92a7602cc42bb9c80b3/statis-tik-gender-provinsi-nusa-tenggara-barat-2018.html>
- Efendy, R. (2014). kesetaraan gender dalam pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 07(2), 142–165.
- Fatimah, J. M. (2014). Komunikasi Keluarga Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Kesetaraan Anak Perempuan dalam Lingkaran Kemiskinan. *Mimbar*, 30(1), 199–208.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>
- Handayani, T., & Widodo, W. (2014). Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Humanity*, 10(September), 184–191. Retrieved from <http://ejurnal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2470>
- Moechtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhadjir, D. & T. (2001). *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Mataram.
- Mukhtar, M. S. (2019). Harakah dan Kemandirian Perempuan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 12(1). Retrieved from <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/684/488>
- Munfarida, E. (2009). Kritik Wacana Seksualitas Perempuan. *Yin Yang Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 4(1), 122–139.
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasir & Lilianti. (2017). Persamaan Hak : Partisipasi Wanita dalam Pendidikan. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(1). Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/1554>
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>
- Pendidikan, P. P. K. dan I. (2007). *Seri Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan*. Jakarta.
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>
- Prantiasih, A. (2014). Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila*

- Dan Kewarganegaraan*, 27(1), 1–6. Retrieved from arbaiyah.prantiasih.fis@um.ac.id
- Rizkiyana, W., & Widodo, W. (2011). *Tentang Pengarusutamaan Gender Pada Jenjang Pendidikan Dasar*. 6(2), 136–143. Retrieved from [ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/1398/2961](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/1398/2961)
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawacana.
- Sakina, A. I. & D. H. S. A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Suntana, M. I. (2012). *Antropologi Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tilaar. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wardani, E. H. (2009). *Belenggu-belenggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morrison dalam The Bluest Eye*. Semarang.
- Yudhaningrum, F. S. (2009). *Bias Gender pada Pendidikan Anak di Keluarga Jawa Pedesaan (Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)*. Yogyakarta.
- Zaki, M. (2018). Fenomena kekuasaan politik dan eksistensi gender dalam perkembangan pendidikan. *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 1–17. Retrieved from <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sophist/article/view/753/418>